

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM INOVASI DESA (PID) DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang)**

**Erin Ayu Wulandari<sup>1</sup>, Afifuddin<sup>2</sup>, Retno Wulan Sekarsari<sup>3</sup>**

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang*

*Jl. MT Haryono No.193, Malang, 65144, Indonesia*

*Email: [erinwulandari04@gmail.com](mailto:erinwulandari04@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

*Penelitian Dilakukan Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Tirtoyudo Dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) Di Masa Pandemic Covid-19 Pada Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Dengan uraian permasalahan yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan PID Pasca Pandemic Covid-19 Di Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang 2) Apa Saja Potensi Desa Tirtoyudo Yang Dapat Di Kembangkan Dalam Mengelola Dan Memaksimalkan Desa Dalam Pengembangan (PID) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang? 3) faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Pengembangan (PID) pada masa pandemi covid 19 di Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang? Peneliti ini dilaksanakan pada masa pandemic covid 19 sehingga penelitian mengutamakan keselamatan peneliti dan para informan. Sementara Itu, Penelitian Ini dilihat dari Teori pokok pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan Adapun Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Dengan fokus sebagai berikut 1)Kebijakan Pemerintah Desa, Peran Kepala Desa, Pengembangan Inovasi 2) Potensi Desa, Pengembangan SDA & SDM, pembentukan Desa mandiri 3) Perubahan Sosial, Ekonomi Masyarakat, Covid 19, dan Infrastruktur Desa. Hasil Penelitian dalam penulisan ini, Hadirnya Program Inovasi Desa (PID), diharapkan memberi banyak manfaat bagi pembangunan desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang antara lain: potensi Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia dapat digali, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pendapatan Asli Desa.namun Realitanya, baru Sebagian kecil saja yang berhasil teralisasi Sebagian tidak. Hal tersebut disebabkan faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya sarana prasarana, minimnya inovasi, diperlukan penguatan modal. Sementara Desa Tirtoyudo sendiri masih berstatus desa berkembang maka dari itu diperlukan studi banding terhadap desa-desa yang mandiri. Sehingga perlu adanya penguatan pola pengembangan SDM aparatur dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga mendorong percepatan pembangunan desa yang inovatif. Dan adanya pandemic covid-19 sangat mempengaruhi gerak pertumbuhan perekonomian di Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.*

**Kata kunci:** Kebijakan, Desa, Pengembangan Program Inovasi Desa (PID), Covid-19

### **Pendahuluan**

Pada awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan munculnya pandemic virus corona atau covid 19 yang menyerang secara global di Negara seluruh dunia termasuk Indonesia yang mengakibatkan banyak hal negative seperti lumpuhnya kehidupan social, politik dan ekonomi sebuah wilayah. Di Indonesia dampak pandemic covid 19 bukan hanya dirasakan pada tingkat kota besar namun dampaknya hingga ke desa-desa. Dampak yang paling parah dirasakan kebanyakan masyarakat, termasuk masyarakat desa adalah dampak penurunan ekonomi, diakibatkan pembatasan sosial, aktivitas manusia dari

satu daerah ke daerah yang lain demi mencegah penyebaran virus.

Tentunya hal ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa secara umum, terutama masyarakat yang mengandalkan pekerjaan pendapatan harian/mingguan. Oleh karena itu, Pemerintah pusat telah mengeluarkan banyak regulasi untuk mencegah penyebaran dan penanggulangan dampak Covid-19, antara lain Peraturan Presiden, Undang-Undang, Peraturan Kementerian, dan Surat Edaran Mak / 2 / III / 2020 kepada Kapolri. mengenai kepatuhan terhadap kebijakan distribusi Pemerintah Coronavirus (covid-19).

Menghadapi masalah ini akibat pandemic covid 19, peneliti melihat peluang yang terbuka lebar dalam Program Inovasi Desa (PID) tetap bisa berregulasi dengan pengelola BUMDes untuk berperan serta membangkitkan perekonomian masyarakat desa serta membangkitkan gairah roda ekonomi. Dengan tunjangan dana desa serta dukungan regulasi dari pemerintah pusat daerah, menjadikan PID serta BUMDes layak untuk diberdayakan demi mengantisipasi badai resesi ekonomi akibat pandemic covid 19 tepatnya di Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Dengan demikian, sangat disayangkan peluang dari Program Inovasi Desa (PID) ini masih belum cukup direspon oleh seluruh desa yang ada Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kesiapan desa untuk suatu peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program Program Inovasi Desa (PID) sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 01.  
 Peluang dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

Peluang	Tantangan
1. Perubahan Desa Menjadi Desa Mandiri	1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Sumber Daya Alam (SDA) Dalam Potensi Pengembangan Alam.
2. Memajukan Produk Unggulan Desa	2. Lemahnya Penguasaan Teknologi
3. Menciptakan Lapangan Kerja Baru	3. Pemerintah Desa Masih Terfokus Pada Pembangunan Fisik.

Adapun peluang dan tantangan Dalam Pelaksanaan (PID) merupakan gambaran dari sudut pandang penulis dari banyak desa yang memiliki kesamaan dalam permasalahan terkait dari faktor eksternal maupun internal. Desa merupakan wilayah yang terkecil dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014. Yaitu desa diberikan suatu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal diskala Desa, dalam meningkatkan kemampuannya yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif guna untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Nurcholis (2011;14) dalam Nurgianti (2019:2) Masyarakat di pedesaan tidak hanya difokuskan pada suatu pemenuhan anggaran yang tersedia melainkan juga pengentasan, masalah kemiskinan, dan kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh banyak faktor, yaitu antara lain; kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat yang relatif rendah, potensi alam di pedesaan yang sepenuhnya belum terealisasi dengan baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong suatu potensi yang tersedia. Menurut Suharto (2014;59) dalam Nurgianti (2019:2) pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama perindividu-individu yang mengalami suatu kemiskinan.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dalam melakukan Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) pada masa pandemi covid 19 di Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang?
2. Apa saja potensi Desa Tirtoyudo yang dapat di kembangkan dalam mengelola dan memaksimalkan Desa dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) pada masa pandemi covid 19 di Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) pada masa pandemi covid 19 di Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang?

#### **Tinjauan Pustaka**

##### **Kebijakan dan Pelayanan Publik di Desa**

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk pelayanan, baik 17 dalam bentuk barang dan jasa, maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Wilson (2006:154) dalam Hayat (2018:12) mengemukakan bahwa kebijakan itu merupakan Tindakan, objektif, dan pernyataan pemerintah pada halhal tertentu, Langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk upaya yang terjadi (atau tidak terjadi). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

kebijakan adalah sebuah keputusan yang berkewenangan untuk kepentingan publik diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi dalam Tindakan maupun keputusan dari pemerintah.

### **Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik**

Riant Nugroho (2011:57-60) Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan melalui:

- 1) Sumer daya atau resources, yaitu antara kebijakn public yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara yang memiliki tujuan menyerap sumber daya negara.
- 2) *Regulatif* dan deregulatif, kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasiseperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM, dsb.
- 3) Dinamisasi dan Stabilitas, kebijakan dinamis adalah kebijakn yang bersifat menggerakkan sumber daya nasioal mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki, seperti hlnya kebijakan desetralisasi.
- 4) Memperkuat negara dan pasar. Kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran negara, seperti kebijakan tentang Pendidikan nasional.

### **Program Inovasi Desa (PID)**

Program Inovasi Desa (PID) dapat diartikan sebagai satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan. Keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang penetapan pedoman umum program inovasi desa, sebagai berikut. Hadirnya Program Inovasi Desa (PID) memberikan banyak manfaat bagi pembangunan desa, yaitu: 1. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat digali 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan pendapat asli desa.

Tujuan Program Inovasi Desa (PID)

#### **a) Tujuan Umum**

PID bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) secara lebih berkualitas melalui pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, replikasi dan/atau adopsi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif, dukungan layanan lembaga-lembaga P2KTD serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan desa-desa agar memperoleh akses dan kualitas

pendidikan dan kesehatan dasar (Petunjuk teknis pelaksanaa PID, 2019: 3).

#### **b) Tujuan Khusus.**

1. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana di desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif.
2. Meningkatkan kapasitas Pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara lebih inovatif dan berkualitas.
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas desa melalui layanan jasa P2KTD untuk mewujudkan replikasi atau adopsi kegiatan inovasi desa.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sosial dasar 40 masyarakat desa (Petunjuk teknis pelaksanaa PID, 2019: 2).

Program Inovasi Desa (PID) dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDTT No.48 Tahun 2018, melalui peningkatan produktivitas perdesaan yang bertumpu pada:

1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, produk unggulan desa guna mendinamisasi perekonomian desa.
2. Peningkatan kualitas SDM Produktivitas perdesaan tidak hanya dilihat dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Dalam konteks kualitas SDM ini, diharapkan untuk merangsang sensitivitas desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa.
3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa dan yang memiliki dampak menguat rekatkan kohesi social masyarakat perdes

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Permendagri No 7 tahun 2007, pemberdayaan adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk

mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (PERMENDAGRI, 2017: 7). Tujuan pemberdayaan masyarakat ialah mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Sejalan dengan konsep yang telah diuraikan tersebut, maka terdapat teori pokok pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2017:114) dalam Nurgiarti (2019:3-5) yakni Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan<sup>32</sup> sebagai berikut:

1. Bina manusia, hal ini dikarenakan tujuan utama dari pengembangan masyarakat ialah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas sistem demi mencapai kesejahteraan manusia itu sendiri.
2. Bina usaha, adalah upaya yang diberikan dalam proses pengembangan masyarakat demi mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai dampak atau manfaat dari proses perbaikan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya berjuang melainkan mampu merasakan dampak dari perjuangan mereka sendiri
3. Bina lingkungan, hal ini lebih berkaitan dengan ketersediaan bahan baku atau sumber daya alam dan lingkungan sosial yang menopang terjadinya proses Adapun tujuan memperdayakan masyarakat lemah.

#### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:2). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3).

Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Tujuan Pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

#### **Corona Virus Disease (covid 19)**

Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang menyerang sistem pernapasan. (kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021)

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat adanya pembatasan sosial. Salah satu upaya afirmasi penanganan di tingkat desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 yang menderegulasi ketentuan tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, Pengamatan(observasi) dan Dokumentasi.

### **Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, fokus penelitian berdasarkan perumusan masalah adalah: Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap pengembangan Program Inovasi Desa (PID) pasca pandemic covid 19. Dalam pengembangan PID berfokus pada umumnya. Seperti buku, jurnal dan internet berupa perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh data-data di lapangan. Dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

### **Pembahasan**

Hadirnya Program Inovasi Desa (PID), diharapkan memberi banyak manfaat bagi pembangunan desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang antara lain: potensi Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia dapat digali, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pendapatan Asli Desa. Namun realitanya, baru sebagian kecil saja yang berhasil teralisasi. Sebagian tidak. Hal tersebut disebabkan faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya sarana prasarana, minimnya inovasi, diperlukan penguatan modal. Sementara Desa Tirtoyudo sendiri masih berstatus desa berkembang maka dari itu diperlukan studi banding terhadap desa-desa yang mandiri. Sehingga perlu adanya penguatan pola pengembangan SDM aparatur dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga mendorong percepatan pembangunan desa yang inovatif. Dan adanya pandemic covid 19 sangat mempengaruhi gerak pertumbuhan perekonomian di desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

### **Kesimpulan**

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, sarana yang disampaikan peneliti kepada pemerintah

Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang:  
untuk Pemerintah Desa Tirtoyudo Lebih Memfokuskan Penggunaan Dana Desa Untuk Kepentingan Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Untuk Pemerintah Desa Tirtoyudo Agar Lebih Memperhatikan Potensi-Potensi Yang Ada Di Desa Tirtoyudo Dan Melestarikannya.

### **Daftar Pustaka**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa  
Desy Amelia Nurgiarti, 2019, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Hal:2 link: 24838 (unesa.ac.id)  
Hayat (2018), Kebijakan Publik. Malang: Intrans Publishing, hlm 11-12  
Hayat (2018), Kebijakan Publik. Malang: Intrans Publishing, hlm 33  
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa